

Abstrak

Pilkada Kota Ternate 2015 terdapat pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadiri kampanye dan mengkampanyekan calon walikota Petahana. Sebanyak 11 lurah, 1 Camat dan 4 Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipanggil dan dimintai keterangan oleh Panwas Kota Ternate. Birokrasi Kota Ternate pada pilkada serentak 2015 melakukan pelanggaran terbanyak di wilayah Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana praktik politisasi birokrasi sebagai instrument politik calon walikota petahana dan faktor yang mempengaruhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan analisis deskriptif, dan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sasaran penelitian ini adalah elite birokrasi, petahana, tim sukses, dan ketua partai koalisi. Hasil penelitian menunjukkan kemenangan calon walikota Petahana Burhan Abdurahman dipengaruhi dukungan elite birokrasi yang berperan sebagai tim elite/tim pemikir dan tim lapangan. Sebagai tim sukses, elite birokrasi berperan sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan politik dilapangan, menjalin komunikasi dan memfasilitasi pertemuan rekanan/donatur dengan kandidat, memanfaatkan fee proyek, penggunaan program pemerintah. Selain itu, tim elite birokrasi berperan melakukan konsolidasi dan mobilisasi pemilih ASN dan masyarakat. Dukungan politik elite birokrasi terhadap petahana dipengaruhi faktor *patron clien*, hubungan keluarga, etnis, dan balas budi. Saran penelitian ini, kedepan perlu diatur secara tegas sanksi (pemecatan) keterlibatan ASN dalam pilkada, dan sanksi (diskualifikasi) bagi petahana yang terbukti melakukan politisasi birokrasi. Perlu memperkuat tugas dan kewenangan pengawas Pemilu menindak pelanggaran dan menjatuhkan sanksi pelanggaran pilkada. Perlu adanya regulasi yang mengatur pelarangan penempatan dan pengangkatan pejabat esalon II yang memiliki hubungan kekerabatan dan etnisitas dengan kepala daerah terpilih. Sehingga kedepan pilkada serentak berlangsung secara adil, netral dan demokratis.

Kata kunci : Politisasi birokrasi, elite, pilkada.

ABSTRACT

In Regional Head Election of Ternate city in 2015, there are some infractions which did by civil state apparatus (ASN) within attend campaign and campaigning the incumbent mayor candidate. As much 11 head of villages, 1 head of sub-districts, and 4 leaders of regional agencies, are called and questioned by the supervision committee of Ternate city. The bureaucracy of Ternate city toward simultaneous regional election in 2015 committing the most offense in North Moluccas Province. The aim of this research is to analyze about how the practice of bureaucracy politization as the political instrument of incumbent mayor candidate and the factors that affected it. Method of this research is qualitative, with descriptive analysis and the type of research is case study. Data collection use interview and documentation. The target of this research are bureaucracy elites, incumbent, success team, and the chief of coalition party. The result of this research show that victory of incumbent mayor candidate, Burhan Abdurahman is influenced by bureaucracy elites that act as elite team/thinker team, and field team. As the success team, bureaucracy elites act as fund source and political financing in the field, build communication and facilitate the meeting of partners/donors with candidate, use project fee, government program utilization. Beside that, bureaucracy elite team have a role to consolidating and mobilization of civil state apparatus (ASN) and society voters. The support of bureaucracy elite toward incumbent is affected by some factors, such as: patron client, kinship, ethnic, and returning the favor. Recommendation of this research, it is necessary to set sanction explicitly (dismissal) for civil state apparatus (ASN) involvement in regional head election, and sanction (disqualification) for incumbent who proven did bureaucracy politization. Need to strengthen the role and authority of election supervisor crack down the violations and give sanction of violation on regional head election. There is needed a regulation which set prohibition of placement and appointment of echelon II officials that have kinship and ethnicity relation with elected regional head. So, in the future, simultaneous regional head election occur fairly, neutral, and democratic.

Keywords: bureaucracy politization, elite, head regional election.